

ABSTRAK

Kabupaten Pamekasan sebagai salah satu daerah penghasil tembakau di Indonesia, menghadapi masalah serius terkait peredaran rokok ilegal. Dengan luas perkebunan tembakau yang mencapai 13.928 hektare dan kontribusi yang luas terhadap produksi tembakau nasional, Pamekasan berpotensi menjadi pusat industri tembakau. Namun, tingginya volume produksi juga membuka peluang bagi peredaran rokok ilegal yang merugikan pendapatan negara melalui pajak dan cukai. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana pelaksanaan penegakan hukum dilakukan terhadap peredaran rokok ilegal serta faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan penegakan hukum di daerah ini.

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah Yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum dan pihak terkait lainnya, sementara data sekunder memuat regulasi dan dokumen resmi yang sesuai. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai situasi pelaksanaan penegakan hukum terhadap rokok ilegal di Pamekasan.

Hasil analisis menunjukkan Ketidakseimbangan antara pendekatan preventif dan represif mengakibatkan efektivitas penegakan hukum Bea Cukai di Pamekasan menjadi lemah atau tidak efektif. Meskipun edukasi kepada masyarakat penting, tindakan represif tidak boleh diabaikan terutama ketika pelanggaran telah terjadi secara massiv dan berlangsung lama. Oleh karena itu, gabungan pendekatan preventif dan represif harus diterapkan secara seimbang untuk menciptakan efek yang maksimal. Edukasi dan upaya preventif atau pencegahan dapat mengurangi jumlah pelanggar baru, sedangkan tindakan represif memastikan bahwa pelanggar yang sudah ada diberi sanksi yang setimpal dan memberikan efek jera. Faktor penghambat utama termasuk kurangnya kesadaran masyarakat akan dampak negatif rokok ilegal serta keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan sinergi penegakan hukum untuk menyeimbangkan upaya preventif dan represif, edukasi masyarakat, peningkatan jumlah personel, pemanfaatan teknologi.

Kata Kunci : Upaya, Masyarakat, Rokok, Illegal

ABSTRACT

Pamekasan Regency, as one of the tobacco-producing regions in Indonesia, faces serious issues regarding the circulation of illegal cigarettes. With a tobacco plantation area reaching 13,928 hectares and significant contributions to national tobacco production, Pamekasan has the potential to become a tobacco industry hub. However, the high production volume also creates opportunities for the circulation of illegal cigarettes, which harm state revenue through taxes and excise duties. This study aims to identify how law enforcement is implemented against the circulation of illegal cigarettes and the factors hindering its enforcement in this region.

The research method used in this study is empirical juridical. This means that the analysis integrates legal materials (as secondary data) with primary data obtained from fieldwork. Primary data were collected through interviews with law enforcement officials and other relevant parties, while secondary data included regulations and official documents. Data analysis was carried out descriptively to provide a clear picture of the situation regarding law enforcement against illegal cigarettes in Pamekasan.

The analysis results show that the imbalance between preventive and repressive approaches weakens the effectiveness of Customs law enforcement in Pamekasan. While public education is important, repressive actions should not be neglected, especially when violations have occurred massively and over a prolonged period. Therefore, a balanced combination of preventive and repressive approaches must be applied to achieve maximum effects. Preventive efforts and education can reduce the number of new violators, while repressive actions ensure that existing violators are sanctioned appropriately, creating a deterrent effect. The main obstacles include a lack of public awareness about the negative impacts of illegal cigarettes and limited resources among law enforcement personnel. To address these challenges, synergy in law enforcement is required, balancing preventive and repressive efforts, educating the public, increasing personnel numbers, and utilizing technology.

Keywords: *Efforts, Community, Cigarettes, Illegal*